

**KONTRIBUSI TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI SULAWESI SELATAN**



BOSOWA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana S1
Pada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas "45" Makassar

OLEH :

SYAMSUL ARIFIN

45 11 023 033

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**

2013

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : KONTRIBUSI TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI SULAWESI SELATAN

N A M A : SYAMSUL ARIFIN

NOMOR STAMBUK : 45 11 023 033

JURUSAN : ILMU POLITIK

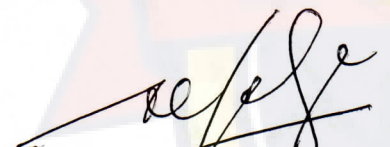
PROGRAM STUDI : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 29 Januari 2014

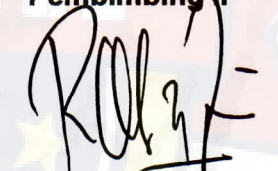
Mengesahkan :

Pembimbing I



(Zulkhaer Burnan, S.IP, MA)

Pembimbing II



(Rosnani, S.IP, MA)

Mengetahui :

Dekan, FISIP

Universitas "45" Makassar



(Dra. Juharni Guntur, M.Si)

Ketua Jurusan Ilmu Politik



(Muh. Ghazali Rettob, S.IP, MA)

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI


Pada hari ini, Rabu tanggal 29 bulan Januari tahun 2014, Skripsi dengan Judul “Kontribusi Tenaga kerja Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan”

Nama : Syamsul arifin
Nomor Stambuk : 45 11 023 033
Jurusan : Ilmu Politik
Program Studi : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Telah diterima oleh pihak Ujian Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas “45” Makassar, untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Jurusan Ilmu Politik Program Studi Hubungan Internasional.







PANITIA UJIAN


(Drs. Syamsuddin Mالدun, M.Pd)
Ketua


(Moh. Ghazali Rettob, S.IP, MA)
Sekretaris

TIM PENGUJI

- 1). **Arief Wicaksono, S. IP, MA** : ()
- 2). **Moh. Ghazali Rettob, S.IP, MA** : ()
- 3). **Zulkhaer Burhan, S.IP, MA** : ()
- 4). **Rosnani, S.IP, MA** : ()

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur hanya milik Allah semata, yang telah memberikan nafas kehidupan bagi seluruh makhluk dan ilmu yang tak mampu dijangkau oleh akal manusia. Sesungguhnya ilmu yang kita dapatkan hanyalah secuil dari kompleksitas ilmu Allah. Shalawat dan salam kepada Muhammad utusan-Nya yang telah menyampaikan wahyu Allah tentang pentingnya membaca.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyelesaian penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) ini, begitu banyak hambatan, tantangan dan rintangan yang penulis hadapi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dengan penuh ketulusan hati kepada Bapak Zulkhaer Burhan, S.IP, MA selaku Pembimbing I, dan kepada Ibu Rosnani, S.IP, MA selaku Pembimbing II, yang meskipun ditengah-tengah kesibukannya masih dapat meluangkan waktunya memberikan bimbingan serta petunjuk kepada penulis mulai dari awal hingga selesainya penulisan Skripsi ini, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Demikian pula dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. Andi Sose, selaku pendiri tunggal Universitas "45" Makassar.
2. Bapak Aksa Mahmud, selaku pelanjut tongkat estafet, Universitas "45" Makassar.

3. **Bapak Prof. Dr. Abdurrahman, SH, MH.** selaku rektor Universitas "45" Makassar, yang telah memberikan perhatian besar terhadap perkembangan besar dan kemajuan pendidikan di Universitas "45" Makassar.
4. **Ibu Dra. Juharni Guntur, M.Si,** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas "45" Makassar, atas perhatian beliau terhadap perkembangan sistem pendidikan dan fasilitas yang ada di Fakultas tercinta ini, dan terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
5. **Bapak Muh. Ghazali Rettob, S.IP, MA,** selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional, atas usaha beliau untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi para mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, dan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
6. **Seluruh Staf Pengajar serta seluruh Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar,** terima kasih banyak atas segala bimbingan dan ilmu, serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama selama menempu pendidikan dibangku kuliah.
7. **Teman-teman Program Studi Hubungan Internasional Universitas "45" Makassar,** dari sanubari empati yang terdalam, penulis ingin menghanturkan terima kasih yang tak terhingga atas segala bantuan dan dukungan anda sekalian selama ini.
8. **Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar,** serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan safu

persatu, yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.

9. Terima kasih kepada keluarga besar EIPe, Himabara, DK, IMBSJI, HIMSARA, keluarga dr. Amalia Tahir, keluarga Kalo yang ada di Makassar; Bang Yos sekeluarga, Muslimin sekeluarga, om Hans sekeluarga, K' Eman Plate sekeluarga, Junaidin, Oby, Rabil, K' Yudin, Ardi, Sunah, Amelia, Arwis, Man, Bang Pretes, Piranha, Dedi kapatra dan masih banyak yang tak sempat disebutkan. Kalian adalah orang-orang hebat yang selalu bersama saat saya di Makassar.
10. Begitupun kepada Ayah dan Ibu, almarhuma Ende Melung, Bpk Moh. Marsin sekeluarga, Bpk Marsel Junedi sekeluarga, Bpk Burhanudin Nali sekeluarga, Bapak Alm. Yusuf kalim, Bpk Muhamad Saleh sekeluarga, almarhumah tanta Ipi, Bpk.Jafar sekeluarga, Nenek Pius sekeluarga, , keluarga besar Nanga, serta semua keluarga yang tidak sempat disebutkan namanya satu per satu, terima kasih yang tak terhingga untuk kalian semua atas dukungan dan do'anya.

Secara kodrat penulis menyadari sepenuhnya, bahwa untuk memperoleh sebuah karya yang sempurna sungguh amat sulit. Tentunya butuh waktu panjang melalui kaji ulang dan evaluasi atau keterbatasan yang penulis miliki, baik secara pragmatis maupun implementasi. Kelemahan intelektualitas adalah pengaruh substansi yang tak dapat penulis pungkiri. Olehnya itu penulis memohon maaf jika dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, baik dalam tata kwalitas maupun dari segi penulisan dan penggunaan kata. Bagi penulis

kekurangan serta kesalahan itulah yang menjadi sebuah pijakan pengembangan wacana untuk merubah rasionalitas dan paradigma berpikir di hari mendatang.

Akhirnya penulis membuka diri bagi setiap saran, kritik yang sifatnya konstruktif (membangun) dari berbagai pihak dan pemerhati dengan senang hati penulis terima, demi untuk penyempurnaan dalam penulisan Skripsi ini di masa mendatang.

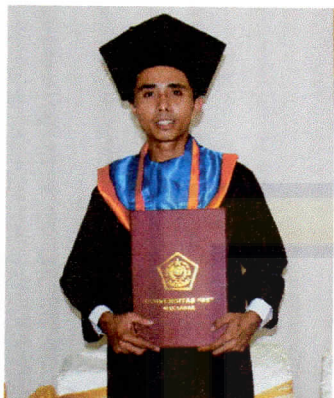
Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin...

Makassar, 29 Januari 2014



BOSOWA

Penulis



BIOGRAFI PENULIS

Penulis lahir di Kalo, Kelurahan Golo wangkung, Kecamatan Sambi Rampas, Kab. Manggarai Timur, NTT pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 1988. Nama lengkap penulis adalah Syamsul Arifin dan akrab disapa Ari. Penulis adalah anak ke-2 dari 3 bersaudara, anak dari Bapak Abdul salam (ayah) dan Mujuna Hasnah (Ibu) dengan pekerjaan sebagai petani. Perjalanan panjang, menyelesaikan Sekolah Dasar di SDI Lengko Ajang (2001), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SLTPK Santu Aloisius (2004), Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Ruteng (2007).

Sejak berusia 19 tahun dan lulus di SMA, sempat mengabdikan di SD tercinta SDI Lengko Ajang, namun hanya bertahan beberapa bulan karena saya harus melanjutkan studi di Kupang. Di Kupang hanya bertahan beberapa bulan juga karena pada saat itu lolos Seleksi nasional Masuk PTN pada salah satu perguruan tinggi negeri di Makassar – Sulawesi Selatan dengan program studi Bahasa Jerman. Kuliah di Makassar adalah keinginan saya sejak SMA. Hal yang membuat saya tertarik adalah keberanian dan keberanian aktivis mahasiswa Makassar dalam memperjuangkan kebenaran. Saya pun langsung bergelut di dunia aktivis walaupun hanya dalam kampus. Setelah menjalani 6 semester pada jurusan bahasa Jerman, tepatnya pada September 2011 saya bersama 18 orang teman dipecat dari kampus karena beberapa aksi protes terhadap kebijakan kampus yang menurut kami merugikan mahasiswa.

Masalah tersebut hampir membuat saya menyerah, namun berkat rahmat Allah Swt. melalui dukungan orang tua dan keluarga besar, akhirnya saya memilih melanjutkan kuliah pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas “45” Makassar, walaupun harus bekerja keras untuk menyesuaikan diri dengan jurusan baru. Di Universitas “45”, saya mendapatkan banyak ilmu yang sangat bermanfaat. Saat ini, saya bisa di Yudisium dan di Wisuda mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) dalam bidang Hubungan Internasional (21 Desember 2013).

Apresiasi yang sebesar-besarnya saya persembahkan untuk guru yang mengajarkan kesabaran (Ende/Ibu), dan guru yang mengajarkan keberanian (Ka’e/Ayah) memohon relakan darah juang Ananda. Kerinduan pula Kepada Kak Wati tercinta, dan adikku Ani tercinta. dan juga sanggen ase ka’e di kampung halaman terima kasih banyak atas segala motivasi dan ketulusan do’a restunya. Karya ini kupersembahkan sepenuhnya buat anda semua, teristimewa buat Ayahbunda tercinta yang tiada pernah lelah dalam membimbing dengan hati yang tulus tanpa harus meminta balasan imbalan apapun.

Insyallah, saya akan mengabdikan ilmu yang telah didapatkan selama ini untuk siapapun yang membutuhkan dan tentunya sesuai dengan kemampuan saya sebagai manusia biasa.

Akhirnya semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, khususnya kepada Ende dan Ka’e sekeluarga. Amien Yaa Rabbal Alamiin..,

Makassar, 29 Januari 2014

Syamsul Arifin



ABSTRAKSI

SYAMSUL ARFIN, 45 11 023 033, dengan Skripsi berjudul: "Kontribusi Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan", dibawah bimbingan Zulkhaer Burhan, S.IP, MA, selaku pembimbing I dan Rosnani, S.IP, MA, selaku pembimbing II.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi Tenaga Kerja Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, selain itu juga untuk mengetahui bagaimana pengelolaan devisa TKI asal Sulawesi Selatan terhadap penanggulangan kemiskinan.

Metode penelitian yang penulis pakai dalam penulisan skripsi ini adalah tipe deskriptif analitis dengan mengumpulkan berbagai literatur-literatur (*Library research*) kemudian menganalisisnya. Teknik analisa data yang digunakan yaitu menggambarkan fakta-fakta yang telah ada dan menyatukannya dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan gambaran bahwa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dalam bentuk remitansi dan devisa. Strategi yang dilakukan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan Tenaga Kerja Indonesia adalah: bimbingan wirausaha, pengembangan usaha, pendampingan, membangun akses untuk memperoleh kredit modal perbankan dan mendorong terbentuknya asosiasi TKI purna.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
BIOGRAFI PENULIS	xi
ABSTRAKSI	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	5
1. Batasan Masalah	5
2. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
D. Landasan Berfikir	7
E. Metode Penelitian	9
1. Tipe Penelitian.....	9
2. Jenis dan Sumber Data	9
3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
4. Teknik Analisa Data	10

	F. Rancangan dan Sistematika Pembahasan	11
BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Teori Pertumbuhan Ekonomi	12
	B. Konsep Pertumbuhan Ekonomi Regional	16
BAB III	: GAMBARAN UMUM	
	A. Gambaran Umum Tenaga Kerja Indonesia	20
	B. Gambaran Umum Tenaga Kerja Indonesia Sulawesi Selatan	39
	C. Gambaran Umum Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan.....	48
BAB IV	: ANALISIS HASIL PENELITIAN	
	A. Kontribusi TKI Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulsel	51
	B. Pengelolaan devisa TKI asal Sulawesi Selatan	58
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gemuruh pembangunan ekonomi masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Yang paling menonjol adalah masalah kemiskinan terutama di Negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia. Kondisi perekonomian Indonesia akhir-akhir ini cenderung semakin mencemaskan karena masih banyak rakyat yang tak kunjung keluar dari kemiskinan. Walaupun berbagai upaya untuk mengendalikan keadaan seperti Keberadaan program-program penanggulangan kemiskinan yang ada saat ini, mulai dari klaster I (bantuan dan perlindungan sosial), klaster II (pemberdayaan masyarakat), klaster III (pengembangan usaha kecil dan mikro), dan klaster IV (program pro-rakyat)¹ telah di lakukan oleh pemerintah, namun tanda-tanda pemulihan ekonomi Indonesia belum juga kelihatan.

Salah satu penyebab kemiskinan adalah kurangnya ketersediaan lapangan kerja yang berakibat pada tingginya angka pengangguran. Pengangguran di Indonesia, termasuk di dalamnya Sulawesi Selatan bukan merupakan hal yang baru. Hal ini dapat dilihat dari adanya angkatan kerja yang tinggi setiap tahun dan terbatasnya kemampuan sector-sektor ekonomi yang ada, khususnya sector formal untuk menyerap pertumbuhan angkatan kerja.²

¹Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013| Buku I – Ringkasan Eksekutif, BAB II, hal. 30 dalam - <http://www.setkab.go.id/berita-8833-perpres-no-392013-rkp-tahun-2014-jadi-acuan-rencana-kerja-kl-dan-pemda.html> diakses tanggal 2 oktober 2013

²Julianti, annisa, *KONTRIBUSI Kecerdasan Emosional Terhadap Pengambilan Keputusan Menjadi Tenaga Kerja Indonesia TKI Di Luar Negeri* dalam <http://www.academia.edu/4970747> diakses tanggal 2 oktober 2013

Masalah pengangguran ini membutuhkan perhatian dan diperlukan upaya-upaya pemecahan permasalahan ketenagakerjaan. Berdasarkan peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 14 tahun 2010 tentang pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, “pemerintah membuka kesempatan kerja melalui program penempatan tenaga kerja ke luar negeri bagi masyarakat Indonesia dengan menjadi tenaga kerja migrant di luar negeri atau biasa dikenal dengan sebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”.³

Upaya ini dipertegas lagi dengan sosialisasi yang dilakukan oleh BNP2TKI tahun 2011 di Pare Pare. Pada saat itu kepala BNP2TKI Jumbuh Hidayat mengatakan dalam sambutannya bahwa “Dengan menjadi TKI Anda sudah berani mengambil resiko kerja ke luar negeri, sementara banyak anak-anak muda lainnya terperangkap dengan narkoba. Karena itu, hasrat untuk berubah dengan bekerja ke luar negeri harus terus dihidupkan setelah Anda kembali ke tanah air. Di luar negeri, Anda kaya dengan pengalaman dan ini bisa menjadi modal berharga ketika kembali ke tanah air,”⁴

Merujuk pada hal di atas, pada tahun 2013 ini jumlah rakyat Sulawesi Selatan yang menjadi TKI di luar negeri telah mencapai 4200 orang dengan devisa yang mereka hasilkan hingga bulan September 2013 Rp. 4 miliar.⁵ Ini menunjukkan bahwa

³³Ibid hal. 2

⁴ Jumbuh Hidayat, 2011 dalam <http://www.bisnis-kti.com/index.php/2011/08> diakses tanggal 10 oktober 2013.

⁵ Data BP3TKI Makassar tanggal 21 November 2013

terdapat 4200 angkatan kerja di Sulawesi Selatan keluar dari masalah pengangguran dengan memilih menjadi TKI.

Sementara itu, Pansus revisi UU TKI DPRRI di luar negeri berpendapat bahwa TKI memberikan kontribusi besar berupa remitansi bagi pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional, namun para TKI juga memerlukan berbagai spectrum perlindungan dari Negara, karena pada umumnya para TKI ini terekspos pada situasi dan kondisi tempat kerja yang berkategori 3D (*Difficult, Dirty, and Dangerous*=sulit, kotor, dan berbahaya). Belum lagi mereka pun rentan terekspos dari berbagai hal yang mencakup pelecehan, pemerasan, penzaliman dan berbagai potensi kejahatan lainnya⁶.

Secara kontekstual, para TKI ini berangkat ke luar negeri untuk memperbaiki basis kehidupan ekonomi mereka dan keluarganya. Keluarga para TKI pun akan senantiasa berharap bahwa upaya keberangkatan para TKI ini membuahkan hasil yang diharapkan. Tidak ada dalam benak mereka semua berharap untuk berhadapan dengan berbagai masalah pelik. Pada BAB III akan di berikan contoh masalah/kasus yang dialami oleh TKI asal Sulawesi Selatan. Kesuksesan dari usaha para TKI inilah yang tentunya diharapkan oleh segenap keluarga mereka dan juga oleh kita semua..

⁶PansusrevisiUUTKI, *tki bukan pahlawan* devisa dalam [http://www.tribunnews.com/tribunners/2012/11/22/diakses tanggal 17 oktober 2013](http://www.tribunnews.com/tribunners/2012/11/22/diakses_tanggal_17_oktob%C3%A9r_2013)

Berbagai masalah yang kian marak dihadapi oleh para TKI di luar negeri secara natural pun menghilangkan tujuan perbaikan basis kehidupan ekonomi mereka. Dengan masalah-masalah yang dihadapi jelas tidak memperbaiki kualitas kehidupan para TKI secara manusiawi. Adalah tugas Pemerintah sebagai penyelenggara Negara untuk menyediakan suatu mekanisme perlindungan yang mumpuni bagi para TKI ini. Hal ini jelas merupakan amanat konstitusi ... *“melindungi segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia ...”*⁷

Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara kedua institusi Negara di atas, dimana Pemerintah yang diwakili oleh BNP2TKI mengajak para pencari kerja untuk menjadi TKI, sedangkan Legislatif dalam hal ini Pansus revisi UU TKI yang justru mempertanyakan tanggungjawab pemerintah setelah melakukan pengiriman TKI. Oleh karena itu Penulis ingin melakukan penelitian dengan judul *“Kontribusi TKI Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan”*. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi TKI terhadap pertumbuhan ekonomi SULSEL, dan bagaimana strategi Pemerintah dalam upaya pencapaian tujuan utama menjadi TKI yaitu keluar dari kemiskinan.

⁷Ibid hal. 3

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Dengan adanya pengiriman TKI, permasalahan ekonomi Indonesia terutama Sulawesi Selatan yang kerap kali muncul mengenai pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan meningkat. Maka dari itu, menjadi penting untuk kita mengetahui kontribusi TKI terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, serta strategi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di Sulawesi Selatan, terutama bagi para TKI. Maka perlu adanya solusi, pemikiran dan sikap atau mental yang harus dipersiapkan dalam melihat fenomena pengiriman TKI.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada bagaimana TKI berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Kontribusi adalah keikutsertaan, melibatkan diri maupun sumbangan'.⁸ Kontribusi TKI terhadap pertumbuhan ekonomi Sulsel berarti sejauh mana keikutsertaan, keterlibatan maupun sumbangan TKI terhadap pertumbuhan ekonomi Sulsel.

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan, sehingga remitansi tersebut memberikan manfaat jangka panjang bagi para TKI.

⁸Anne, Ahira "Pengertian Kontribusi", dalam <http://eprints.uny.ac.id/8957/3/BAB%202-08502241019.pdf>, diakses 20 November 2013.

2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kontribusi remitansi TKI terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan?
- b. Bagaimana pengelolaan devisa TKI asal Sulawesi Selatan terhadap penanggulangan kemiskinan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menggambarkan kontribusi remitansi TKI terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.
- b. Menggambarkan pengelolaan devisa TKI asal Sulawesi Selatan terhadap penanggulangan kemiskinan.

2. Kegunaan Penelitian

1. Menjadi bahan aspek kajian akurat bagi civitas akademika yang tertarik untuk mengembangkan ilmu hubungan internasional dalam kaitannya dengan masalah TKI.
2. Sebagai bahan referensi mengenai pola perumusan kebijakan Ketenagakerjaan oleh pemerintah Sulawesi Selatan di masa sekarang maupun masa akan datang.



3. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar sarjana pada Program studi Ilmu Hubungan Internasional, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas “45” Makassar.

D. Landasan Berfikir

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

- a. Ferguson⁹ (1965) mengatakan bahwa tujuan utama kebijakan ekonomi adalah

(1) *full employment*(2) *economic growth*, dan (3) *price stability*. Yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Menciptakan *full employment* atau setidaknya pengangguran yang rendah menjadi tujuan pokok pemerintahan pusat maupun daerah. Dalam kehidupan masyarakat, pekerjaan bukan saja berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi sekaligus juga memberikan harga diri atau status bagi yang bekerja.
2. Adanya *economic growth* (pertumbuhan ekonomi), karena selain menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat kerja baru, juga diharapkan dapat memperbaiki kehidupan manusia atau peningkatan pendapatan. Tanpa perubahan, manusia merasa jenuh atau bahkan merasa tertinggal.

⁹ Ferguson, 1965, dikutip oleh Robinson Tarigan, Ekonomi Regional teori dan aplikasi, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012, hal. 5

3. Terciptanya *price stability* (stabilitas harga) untuk menciptakan rasa aman/tentram dalam perasaan masyarakat

b. Teori pertumbuhan ekonomi Boediono;

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang.” Jadi, persentase pertambahan *output* itu haruslah lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut¹⁰.

2. Teori Demokrasi Sosial.

Teori ini menganggap bahwa “kemiskinan bukanlah persoalan individu yang bersangkutan. Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses kelompok kepada sumber-sumber kemasyarakatan”¹¹.

Pendukung demokrasi sosial berpendapat bahwa; kesetaraan merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan . Pencapaian kebebasan hanya dimungkinkan jika setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber, seperti pendidikan, kesehatan yang baik dan pendapatan yang cukup. Kebebasan lebih dari sekadar bebas dari pengaruh luar, melainkan pula bebas dalam menentukan pilihan-pilihan (Choices). Dengan kata lain, kebebasan berarti memiliki kemampuan (capabilities) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, menghindari kematian dini, membaca, menulis dan kemampuan berkomunikasi. Negara memiliki peranan dalam menjamin bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dalam transaksi-transaksi

¹⁰ Boediono, 1985, dikutip oleh Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional teori dan aplikasi*, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2012, hal. 1

¹¹ Midgley dalam <http://ratihrantibudakjurnal.blogspot.com/2011/10/teori-demokrasi-sosial-sebagai.html>, diakses tanggal 22 oktober 2013

kemasyarakatan yang memungkinkan mereka menentukan pilihan-pilihannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya¹².

Strategi penanggulangan kemiskinan haruslah bersifat institusional. Contoh Negara yang menganut teori demokrasi sosial dalam penanggulangan kemiskinan adalah Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Jepang. Jaminan sosial berbentuk pemberian tunjangan pendapatan atau dana pensiun, misalnya, dapat meningkatkan kebebasan karena dapat menyediakan penghasilan dasar, sehingga orang dapat memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya. Sebaliknya, ketiadaan pelayanan dasar tersebut dapat menyebabkan ketergantungan (dependency) karena dapat membuat orang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya.

3. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan penulis gunakan adalah deskriptif dimana penulis akan menggambarkan dan menguraikan fakta-fakta yang ditemui dalam penelitian berkaitan dengan Kontribusi TKI Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan.

2. Jenis Dan Sumber Data

¹² <http://febryaristian.blogspot.com/2012/12/teori-kemiskinan-dan-kebijakan-html>, diakses tanggal 22 Oktober 2013

Data yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari data sekunder. Data sekunder berasal dari pengumpulan data yang penulis lakukan selama penelitian, dari berbagai sumber yaitu berupa instansi terkait, buku, laporan-laporan, terbitan berkala dan dari sumber lain yang relevan. Adapun data sekunder yang dibutuhkan antara lain :

- a. Data mengenai Kontribusi TKI Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan satu teknik pengumpulan data yaitu telaah pustaka dan penelusuran terhadap literatur. Adapun tempat-tempat yang dijadikan tempat pengumpulan data antara lain :

- a. Perpustakaan Wilayah Sulawesi Selatan di Makassar
- b. Perpustakaan Universitas "45" Makassar di Makassar
- c. Perpustakaan Universitas Hasanudin Makassar di Makassar
- d. Kantor BP3TKI di Makassar
- e. Depnakertrans di Makassar
- f. BPS
- g. Internet dengan alamat situs dan lain-lain.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian atau analisis kualitatif, dimana analisis data diarahkan pada data non-matematis. Analisis

ini dilakukan terhadap data sekunder berupa cuplikan, kutipan, dokumen atau laporan resmi Kontribusi TKI yang didukung oleh angka-angka. Adapun tampilan data kuantitatif dalam penelitian ini adalah untuk memperkuat analisis kualitatifnya.

G. Rancangan Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian dan hasil analisis data penelitian ini akan disusun dalam karya tulis ilmiah (skripsi), dengan rancangan sistematika sebagai berikut :

- c. Bab Pertama, yaitu pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual dan metode penelitian.
- d. Bab Kedua, yaitu tinjauan pustaka, berisi penelusuran kepustakaan dan literatur tentang konsepTKI, konseppertumbuhan ekonomi,dan pengentasan kemiskinan.
- e. Bab Ketiga, yaitu gambaran umum objek penelitian, berisigambaran umum Tenaga Kerja Indonesia dan pertumbuhan ekonomi serta fenomena kemiskinan di Sulawesi Selatan.
- f. Bab Keempat, yaitu, analisis hasil penelitian, berisi tentang Kontribusi TKI terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatandan strategi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan TKI Sulsel.
- g. Bab Kelima, yaitu penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran
- h. Daftar Pustaka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau regional adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut. Agar dapat melihat pertumbuhan ekonomi dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya harus dinyatakan dalam nilai riil atau angka-angka. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi factor-faktor produksi yang terjadi di wilayah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti menggambarkan secara kasar kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah ditentukan oleh besarnya pertumbuhan ekonomi dan seberapa besar terjadi *transfer payment*, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah.

Menurut Boediono¹³, "Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang." Jadi, persentase pertambahan *output* itu haruslah lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecendrungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut.

¹³ Boediono, *op.cit* hal.14

1. Teori Ekonomi Klasik

Orang pertama yang membahas pertumbuhan ekonomi secara sistematis sehingga dijuluki sebagai nabi ekonomi adalah Adam Smith (1723-1790) yang membahas masalah ekonomi dalam bukunya *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776). Inti ajaran Smith adalah agar masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi apa yang dirasanya terbaik untuk dilakukan. Menurut Smith, sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner. Posisi stasioner terjadi apabila sumber daya alam telah seluruhnya dimanfaatkan. Walaupun ada pengangguran, hal itu bersifat sementara. Pemerintah tidak perlu terlalu dalam mencampuri urusan perekonomian. Tugas pemerintah adalah menciptakan kondisi dan menyediakan fasilitas yang mendorong pihak swasta berperan optimal dalam perekonomian. Pemerintah tidak perlu terjun langsung dalam kegiatan produksi dan jasa. Peran pemerintah adalah menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat serta membuat aturan main yang member kepastian hukum dan keadilan bagi para pelaku ekonomi.

Dalam hal ini pemerintah berkewajiban menyediakan prasarana sehingga aktivitas swasta menjadi lancar. Pengusaha



perlu mendapat keuntungan yang memadai agar dapat mengakumulasi modal dan membuat investasi baru. Terhadap pemikiran Smith, perlu dicatat pendapat Joseph Schumpeter¹⁴ yang mengatakan bahwa posisi stasioner tidak akan terjadi karena manusia akan terus melakukan inovasi

Pada tahun 1929-1932, dunia mengalami depresi ekonomi. Akibatnya pandangan Smith kemudian dikoreksi oleh John Maynard Keynes (1936) dengan mengatakan bahwa untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang stabil, pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal (perpajakan dan perbelanjaan pemerintah), kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar), dan pengawasan langsung. Dalam kerangka ekonomi wilayah, ada pandangan Smith yang tidak bias diterapkan sepenuhnya, misalnya tentang lokasi dari kegiatan ekonomi tersebut. "Sesuai dengan tata ruang yang berlaku maka lokasi dari berbagai kegiatan sudah diatur dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus memilih diantara lokasi yang diperkenankan."¹⁵

Terlepas dari kekurangan yang terdapat dalam teori Smith, pandangannya masih banyak yang relevan untuk diterapkan dalam

¹⁴ Ibid hal 18

¹⁵ Robinson Tarigan, 2012, Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi, hal 48



perencanaan pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk itu, menurut Robinson Tarigan (2012); hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah “member kebebasan kepada setiap orang/badan untuk berusaha (pada lokasi yang diperkenankan): tidak mengeluarkan peraturan yang menghambat pergerakan orang dan barang.”

2. Teori Harrod-Domar Dalam Sistem Regional

Teori ini didasarkan pada asumsi: “(1) Perekonomian bersifat tertutup, (2) hasrat menabung, (3) proses produksi, (4) tingkat pertumbuhan angkatan kerja sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.”¹⁶

3. Teori Pertumbuhan Neoklasik

Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber: “(1) akumulasi modal, (2) bertambahnya penawaran tenaga kerja,(3) dan peningkatan teknologi.”¹⁷ Teknologi ini terlihat dari peningkatan *skill* atau kemajuan teknik sehingga produktivitas perkapita meningkat .

¹⁶Ibid hal 20

¹⁷ Robert M. Solow(1970) dan T.W. Swan (1956) dikutip oleh Robinson Tarigan, 2012, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, hal 52

B. Teori Pengentasan Kemiskinan

Untuk konteks kemiskinan Sulawesi selatan, ada sebuah jurnal yang ditulis oleh Agussalim¹⁸ yang bersifat rekomendasi kepada pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ada beberapa hal yang disarankan:

1. Pada tingkatan makro mesin pertumbuhan (*Engine of Growth*) harus digeser dari sector yang memiliki elastisitas penyerapan tenaga kerja yang rendah (misalnya; keuangan, telekomunikasi, keuangan dan restoran) ke sector yang memiliki elastisitas penyerapan tenaga kerja yang tinggi (misalnya; pertanian, pertambangan, industry pengolahan dan perdagangan). Implikasinya seluruh desain kebijakan daerah harus berorientasi pada upaya mendorong dan memfasilitasi berkembangnya sector-sektor ekonomi yang disebutkan terakhir.
2. Pada tingkatan mikro, program-program yang diarahkan untuk menekan beban pengeluaran penduduk miskin di satu sisi dan meningkatkan produktivitas penduduk miskin di sisi lain. Harus terus diintegrasikan. Program layanan pendidikan dan kesehatan untuk rumah tangga miskin perlu terus dilanjutkan dengan memperluas jangkauan dan meningkatkan aksesibilitas.
3. Pada tataran kelembagaan, perlu dibangun sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, terutama

¹⁸ Agussalim, *memaknai angkakemiskinan Sulsel*, 10 september 2012

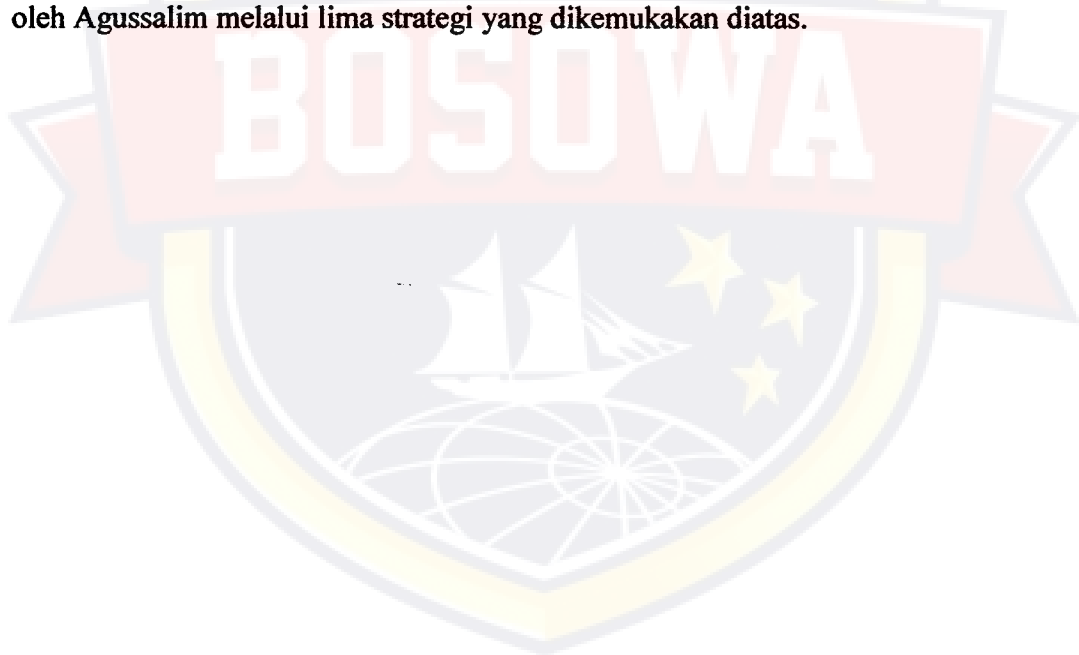
untuk kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin yang tinggi. Untuk mendesain kebijakan, strategi, program dan penganggaran penanggulangan kemiskinan. Lembaga donor internasional juga perlu digiring dan diarahkan untuk bekerja pada rana pemberdayaan masyarakat miskin.

4. Pada tataran lokus, program penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan ke wilayah-wilayah pedesaan yang selama ini menjadi tempat bermukim sebagian besar penduduk miskin. Perbaiki infrastruktur dasar pedesaan, peningkatan aksesibilitas, peningkatan layanan dasar, pemberian skim kredit mikro dan pemberian hak-hak dasar.
5. Pada tataran horizon perencanaan, strategi penanggulangan kemiskinan dalam perspektif jangka menengah dan jangka panjang harus bertumpu pada upaya peningkatan kemampuan dan kapabilitas penduduk miskin untuk mengakses sumber daya ekonomi. Dalam perspektif ini, pengentasan kemiskinan perlu dikorelasikan dengan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Upaya semacam ini akan sanggup memperbaiki produktivitas, mengurangi ketergantungan, menekan kerentanan, dan meningkatkan kemandirian penduduk miskin.

Beberapa konsep yang tertulis di atas, akan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Konsep TKI membantu menjelaskan bagaimana TKI itu sendiri, walaupun dalam konsep tersebut lebih khusus membahas tentang TKW.

Selanjutnya beberapa teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh para ahli mulai dari seperti Adam Smith, Harrod-Domar dan Solow Swan, akan membantu menjelaskan bagaimana *remitansi* yang dihasilkan oleh TKI asal SULSEL dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.

Dan yang terakhir adalah konsep pengentasan kemiskinan yang dikemukakan oleh Agussalim melalui lima strategi yang dikemukakan diatas.



BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Tenaga Kerja Indonesia

Fenomena keberadaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri bukanlah suatu hal yang baru. Jika dilihat dari catatan sejarah, kepergian warga Indonesia untuk bekerja di luar negeri mulai pada abad XIX. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah colonial Belanda yang menempatkan warga Indonesia ke Suriname dan Kaledonia Baru untuk menjadi kuli kontrak. TKI yang bekerja di luar negeri meninggalkan rumah mereka untuk beberapa alasan termasuk kurangnya peluang kerja di dalam negeri, kemiskinan, dan perbedaan gaji di Indonesia dan Negara tujuan. Adalah kenyataan, pekerja migrant membantu Negara mengatasi kemiskinan karena remitansi yang dikirim umumnya untuk kesehatan, pendidikan, pangan, perumahan, dan modal kerja mikro sehingga membuka peluang kerja di negaranya.¹⁹

Angka pengangguran yang besar dan kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia mendorong orang-orang untuk mencari pekerjaan di luar daerah asal mereka dan banyak yang memutuskan untuk pergi ke luar negeri setelah mendengar adanya pekerjaan dari agen perekrutan dan jaringan kerja sosial

¹⁹ (<http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources> diakses tanggal 20 november 2013)

dengan tawaran gaji yang lebih tinggi seperti di Malaysia, Arab Saudi, Hongkong, Kuwait, Singapura dan Emirat Arab.

Secara global, migrasi didorong oleh banyaknya kekurangan tenaga kerja di sektor domestic seperti pembantu rumah tangga, industry pengolahan dan sector jasa atau layanan. Umumnya pekerjaan seperti ini tidak diinginkan oleh warga negaranya sendiri karena gaji yang terlalu rendah menurut mereka. Akibatnya beberapa Negara mengadopsi kebijakan untuk memfasilitasi migrasi tenaga kerja. Negara-negara di Timur Tengah dan Asia Tenggara menawarkan gaji yang lumayan lebih besar dibandingkan dengan upah di Indonesia, sehingga TKI tertarik bekerja di luar negeri di sector ini.

Penempatan TKI ke luar negeri merupakan program nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas Sumber Daya Manusi (SDM). Penempatan TKI ke luar negeri dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja disertai dengan perlindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri dan sampai tiba kembali di Indonesia.

Namun, kepergian TKI untuk bekerja di luar negeri sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) terutama di kawasan Timur Tengah merupakan realita yang membutuhkan perhatian banyak pihak. Keinginan untuk memperbaiki taraf kehidupan keluarga mendorong banyak perempuan desa pergi meninggalkan suami, anak dan keluarganya meskipun hanya bermodalkan

pengetahuan serta pemahaman yang minim mengenai persyaratan dan prosedur resmi bekerja di luar negeri. Mereka tidak memahami berbagai resiko yang menghadang di setiap tahap penempatan. Mereka juga tidak memahami hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam proses penempatan seperti Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), pengguna jasa dan mitra PJTKI di luar negeri. Tak pelak hal ini membuat para TKI rentan terhadap setiap bentuk eksploitasi, baik ekonomi, fisik maupun psikologis.

Bekerja sebagai PRT di luar negeri merupakan pilihan yang masuk akal bagi banyak kaum perempuan pedesaan. Jenis pekerjaan ini menjadi baik. Kelangkaan akan lowongan pekerjaan di sekitar daerah tempat tinggal, dengan jumlah penghasilan tetap serta dapat mencukupi pemenuhan kebutuhan sehari-hari, merupakan kenyataan hidup yang harus mereka hadapi. Terlebih, pilihan jenis pekerjaan yang tersedia pun semakin menyempit dengan minimnya latar belakang pendidikan yang dimiliki. Bagi mereka, bekerja menjadi PRT di luar negeri lebih menjanjikan upah besar dibandingkan dengan upah yang diperoleh dengan bekerja pada pekerjaan sejenis di kota-kota besar Indonesia.²⁰

1. Pengelompokan TKI

TKI dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu TKI legal dan TKI ilegal. TKI legal adalah TKI yang hendak mencari pekerjaan di luar negeri dengan mengikuti prosedur dan aturan serta mekanisme secara hukum yang

²⁰ (<http://kalyanamitra.or.id/index.php>, diakses pada tanggal 20 November 2013).

harus ditempuh untuk mendapatkan ijin bekerja di luar negeri, para pekerja juga disertai dengan surat-surat resmi yang menyatakan ijin bekerja di luar negeri. TKI legal akan mendapatkan perlindungan hukum, baik itu dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah Negara penerima. Oleh karena itu, para TKI ini juga harus melengkapi persyaratan legal yang diajukan oleh pihak imigrasi Negara penerima.

TKI legal selanjutnya akan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab pada bidang ketenagakerjaan, dan terdaftar di instansi terkait sebagai tenaga kerja asing di Negara penerima. Para TKI legal juga memiliki perjanjian kerja, yaitu perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban pihak terkait, berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif serta adil dan setara tanpa diskriminasi, penempatan TKI legal diarahkan untuk menempatkan pekerja pada jabatan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan perlindungan hukum.

Sedangkan TKI ilegal dari Indonesia merupakan akibat beberapa faktor yang saling terkait, termasuk jumlah makelar yang banyak dan agen perekrutan yang tidak terdaftar di daerah pedesaan, kurangnya pengetahuan di antara TKI tentang prosedur migrasi yang benar dan HAM migrant, lemahnya keterlibatan pemerintah dalam menyediakan informasi dan perlindungan bagi TKI, lemahnya penegakan hukum dan kegagalan untuk menuntut mereka yang terlibat dalam praktek perekrutan terlarang dan tidak bermoral.

Dikarenakan rendahnya pengetahuan para calon TKI di Indonesia, sangatlah penting apabila terdapat kerangka kerja hukum yang luas berfokus pada penegakan hak-hak tenaga kerja dan pencegahan perekrutan yang tidak resmi.

Ada tiga macam kegiatan migrasi ilegal: masuk dan keluar dari suatu Negara secara ilegal, tinggal secara tidak resmi, dan pada akhirnya menjadi pekerja ilegal. TKI ilegal juga memberikan dampak bagi para pelaku lain selain TKI sendiri, termasuk keluarga mereka, masyarakat, orang yang terlibat dalam perekrutan (makelar dan agen perekrutan tidak resmi) dan Negara. Di kedua Negara, Indonesia dan Negara tujuan, seseorang yang terlibat dalam migrasi resmi maupun tidak resmi bias mendapatkan keuntungan besar dengan mengimpor tenaga kerja.²¹

2. Permasalahan TKI dari pra pemberangkatan, masa penempatan, dan purnapenempatan.

Hingga saat ini permasalahan masih sering muncul sebagai akses dari transaksi calon tenaga kerja dan penyedia jasa penempatan serta jenis jabatan yang ditawarkan. Permasalahan ini sudah timbul sejak TKI direkrut, baik pra pemberangkatan, saat penempatan, maupun purna penempatan. Hal tersebut memiliki peluang memunculkan permasalahan TKI di luar negeri berupa perekrutan ilegal, pemalsuan dokumen dari yang dipersyaratkan, baik untuk

²¹(http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/published_docs/Final-LM-Report-BahasaIndonesia.pdf, diakses pada tanggal 20 november 2013).

calon TKI maupun penyedia jasa penempatan (termasuk fasilitas penampungan TKI)

Beberapa permasalahan TKI²²

a. Permasalahan pra pemberangkatan seperti perekrutan illegal, pemotongan gaji terlalu besar, di penampungan disuruh menandatangani surat, apabila batal berangkat calon TKI harus membayar ganti rugi yang cukup besar. Kondisi di penampungan yang buruk yaitu kotor, tanpa tempat tidur, makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan dan kelayakan. Calon TKI tidak diberikan pelatihan, tetapi mereka lulus uji kompetensi dan mendapatkan sertifikat pelatihan, pelatihan dilakukan sekedar formalitas. TKI menandatangani surat perjanjian dalam waktu yang sedikit sehingga mereka tidak sempat membaca dan mempelajari isi perjanjian kerja dan tandatangan calon TKI dipalsukan dalam perjanjian kerja. Dan penelantaran kasus ketika diadakan kepada pihak berwajib.

b. Permasalahan pada masa penempatan seperti:

TKI diperjualbelikan antar agensi di luar negeri dan dijadikan “wanita penghibur” di daerah transit. Jenis pekerjaan tidak sesuai

²²Pusditfo Depnakertrans, Jakarta 2008 dalam([http://www. iom. int/ jahia/ webdav/ shared/ shared/ mainsite/ published_docs/ Final-LM-Report-BahasaIndonesia.pdf](http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/published_docs/Final-LM-Report-BahasaIndonesia.pdf), diakses pada tanggal 20 november 2013).

dengan perjanjian kerja (PK), jam kerja melampaui waktu tanpa ada gaji tambahan. TKI tidak memegang dokumen apapun, karena semua dokumen ditahan oleh majikan. Dan masih banyak lagi masalah lain yang melanda banyak TKI di luar negeri.

c. Permasalahan pada purna penempatan seperti:

Tidak terpenuhinya hak-hak asuransi, retribusi pajak, pemerasan dan perlakuan diskriminatif, luka-luka tidak mendapatkan perawatan medis karena tidak ada crisis centre yang memberikan pelayanan pada pos kedatangan. Sebenarnya masih banyak masalah lain yang belum sempat dijelaskan dalam.

3. Perlindungan TKI

Menyangkut aspek perlindungan dan pemberdayaan TKI, kebijakan peningkatan perlindungan TKI yang dikembangkan pemerintah adalah perlindungan bersifat menyeluruh, mulai dari pra, pada saat penempatan, dan purna penempatan. Jenis perlindungan TKI mencakup:

- a. Perlindungan preventif-antisipatif, berupa pencegahan kemungkinan terjadinya masalah yang menimpa TKI atau calon TKI seperti membenahan mekanisme, pembuatan regulasi, sosialisasi program, penggunaan, penetapan standar kualifikasi, pengawasan terhadap regulasi, serta pemberdayaan calon TKI.
- b. Perlindungan kuratif/represif, berupa penindakan terhadap pelanggaran aturan ketenagakerjaan.

- c. Perlindungan fasilitatif dan rehabilitative, berupa bantuan penyelesaian terhadap dipenuhinya hak TKI, serta pemulihan harkat (fisik dan psikis) TKI.
- d. Perlindungan promotif berupa peningkatan potensi TKI dan daya guna hasil kerja TKI (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia).

Berkenaan dengan perlindungan TKI, secara umum pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri, termasuk TKI yang tertimpa masalah di luar negeri dan memerlukan bantuan penyelesaian masalahnya. Secara institusional, tanggung jawab pemberian perlindungan WNI/TKI yang berada di luar negeri dikoordinasikan oleh kementerian Luar Negeri dengan melibatkan peran instansi-instansi dan lembaga terkait, di dalam maupun di luar negeri. Penanganan teknis perlindungan bagi WNI yang berada di luar negeri dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia (KBRI/KJRI) setempat. Khusus menyangkut penyelesaian masalah yang menimpa TKI di luar negeri, KBRI/KJRI dan Kemenlu berkoordinasi dengan Kemenakertrans dan BNP2TKI.

4. Kebijakan dan strategi penempatan TKI ke luar negeri.

Kebijakan penempatan TKI ke luar negeri diarahkan untuk memanfaatkan peluang kerja di luar negeri dengan mengedepankan aspek

perlindungan harkat dan martabat serta keselamatan dan kesehatan TKI, sejak di daerah asal, selama di Negara tujuan hingga kembali ke daerah asal. Untuk itu menurut Erman Suparno²³, strategi yang telah dan akan dilakukan pemerintah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni:

- Regulasi, dilakukan dengan menerbitkan undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dan menyusun berbagai peraturan pelaksanaannya.
- Kelembagaan, dilakukan dengan membagi kewenangan pusat dan daerah secara jelas di dalam system penempatan dan perlindungan TKI.
- Tindakan, dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain: Melaksanakan inpres No. 06 tahun 2006 tentang Reformasi Kebijakan Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri; Meningkatkan kualitas TKI melalui pelatihan keterampilan, kemampuan, bahasa dan persiapan mental; Memberikan perlindungan terhadap hak dan harta TKI melalui program asuransi TKI yang dilakukan oleh lima konsorsium

²³ Erman Suparno, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Maret 2009, dalam (http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1700&Itemid=195, diakses pada tanggal 20 november 2013).

asuransi; Meningkatkan hubungan bilateral dengan Negara penempatan TKI dalam bentuk penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU); Membentuk empat sentra pelayanan penempatan dan perlindungan TKI (SP3TKI) di Serang, Denpasar, Riau dan Kuala Tungkal; Membentuk atase ketenagakerjaan di lima Negara, di luar Negara-negara yang telah memiliki Atase ketenagakerjaan, yaitu Singapura, Brunai Darussalam, Korea Selatan, Qatar, dan Yordania; Aktif dalam forum internasional yang diharapkan dapat meningkatkan perlindungan bagi TKI seperti *International Law Commission (ILC)*, sidang *International Organization for Migration (IOM)*, *Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)*; Melakukan registrasi dan penerbitan Surat Ijin Pelaksana Penempatan TKI Swasta (SIPPTKIS); Turut melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang; Membina dan pemberdayaan TKI purna agar dapat memanfaatkan penghasilannya menjadi usaha ekonomi produktif dengan memberikan bimbingan wirausaha, pengembangan usaha, pendampingan, membangun akses untuk memperoleh kredit modal perbankan, Mendorong terbentuknya Asosiasi TKI purna yang dimaksudkan sebagai

wadah integrasi dan konsultasi TKI purna dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi dan usaha yang mereka miliki.

Pada tahun 2004, Parlemen Indonesia mengesahkan UU tentang Perlindungan dan Penempatan TKI di luar negeri (UU No. 39 tahun 2004). Pemerintah mengeluarkan beberapa Intruksi Presiden, mulai dari Intruksi Presiden No. 6 tahun 2006 yang menguraikan tindakan reformasi utama yang harus dilakukan semua badan pemerintah terkait di bawah koordinasi Kementerian bidang Ekonomi secara keseluruhan. Kemudian, peraturan Presiden No.81 tahun 2006 tentang pendirian Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Lembaga ini diharapkan berkoordinasi langsung dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.²⁴

Proses reintegrasi sosio-ekonomi merupakan bagian penting dari perlindungan TKI dan upaya untuk memperbaiki kesejahteraan TKI dan keluarganya. Tetapi UU No. 39 tahun 2004 tidak mencakup perlindungan TKI sepulangnya mereka saat reintegrasi padahal manfaat dari pengalaman kerja di luar negeri dan gaji yang mereka hasilkan bias ditingkatkan bila pelayanan penempatan tenaga kerja di Indonesia juga didampingi dengan pendidikan keuangan untuk mengelola penghasilan mereka dari luar negeri.

²⁴(<http://www.bnptki.go.id/infomainmenu281/reformasimainmenu-222/339-reformasi-penempatan-dan-perlindungan.html>, diakses tanggal 25 November

Ada banyak kasus TKI yang pulang, tetapi tidak bias melaporkan masalah yang dialami, misalnya TKI mendapati bahwa gajinya tidak dibayarkan oleh majikan mereka setelah pulang ke negaranya. Menurut studi yang dilakukan oleh *The Institute for Ecosoc Rights*²⁵ pada tahun 2007. TKI yang pulang kerja dari luar negeri ingin mendapatkan:

1. pelatihan dan dan bantuan untuk mengelola usaha;
2. dukungan dalam membentuk koperasi;
3. bantuan dalam menangani asuransi dan klaim gaji dari kerja di luar negeri;
4. dukungan menyelesaikan konflik dalam keluarga

Selain inisiatif akhir di tingkat nasional, umumnya reformasi pemerintah selama ini bersifat ad hoc dan tidak membentuk strategi berhubungan dan komprehensif dalam menangani banyak isu pelik mengenai manajemen migrasi di Indonesia, khususnya perlindungan hak TKI dan migrasi illegal. Indonesia menandatangani konvensi PBB atas perlindungan Hak-Hak semua Tenaga Kerja di luar negeri dan anggota keluarga mereka, namun UU dan kebijakan migrasi tenaga kerja nasional masih ditujukan untuk mengurangi pengangguran daerah dan cenderung berfokus pada fasilitasi arus TKI daripada menciptakan mekanisme perlindungan bagi mereka.

²⁵*The Institute for Ecosoc Rights, 2007*, dalam http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/51987/H11mwd_BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf tanggal 25 november.

Hak-hak para TKI berada di bawah kerangka kerja perundang-undangan sekarang ini, tetapi tidak sama dengan hak-hak anggota keluarga TKI. Hak-hak keluarga TKI tidak diakui dalam UU No. 39 tahun 2004, jadi keluarga tidak mempunyai akses ke informasi mengenai bekerja di luar negeri. Mereka tidak punya hak untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga mereka atau menerima dokumen dan informasi penting dari anggota keluarga yang bekerja di luar negeri. Ini benar-benar sangat menghalangi keluarga TKI yang ingin membantu anggota keluarga mereka yang bermasalah. Banyak TKI kehilangan kontak dengan anggota keluarga dari awal proses sebelum keberangkatan atau selama mereka bekerja di luar negeri. Kasus ini bias sangat bermasalah bagi TKI perorangan, karena mereka berada dalam situasi yang sangat terisolasi, mereka kesulitan untuk menghubungi pihak berwenang setempat untuk mendapat bantuan bila terjadi eksploitasi atau penganiayaan.

Ada 4 pasal dalam UU No. 39 Tahun 2004 yang dengan jelas memerintahkan lembaga pemerintah untuk bersama-sama bertanggung jawab dalam penempatan dan perlindungan TKI, yaitu pasal 5, memberikan mandate hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penempatan TKI, dengan pilihan bahwa pemerintah daerah tidak harus terlibat, mendelegasikan wewenang dari pemerintah pusat; pasal 55, serupa merujuk ke prihal kerjasama antara pemerintah pusat dan regional untuk menyaksikan penandatanganan mempunyai wewenang untuk bertanggung jawab; pasal 73, mengenai repatriasi para TKI dalam situasi darurat, seperti perang di Negara tujuan, melibatkan kerja sama

dengan KBRI, BNP2TKI dan pemerintah di tingkat nasional dan daerah; dan tugas perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri, kebutuhan kolaborasi dan koordinasi yang jelas dalam pengawasan penempatan kerja.²⁶

Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 tentang pendirian BNP2TKI

BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah non Departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNP2TKI dibentuk berdasarkan UU No. 39 tahun 2004 dan Perpres No. 81 tahun 2006, operasional bulan maret 2007. BNP2TKI tidak sama dengan LPND pada umumnya yang tidak ada keanggotaan dari instansi lain, sedangkan BNP2TKI keanggotaannya berasal dari berbagai instansi pemerintah terkait karena kegiatan penempatan dan perlindungan TKI sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi sector/ instansi lain.

BNP2TKI ini dibentuk dengan tujuan:

1. untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI (pasal 94 UU No. 39 tahun 2004);
2. untuk melakukan pembenahan/reformasi dalam proses penempatan TKI ke luar negeri, pelayanan yang mudah, murah, cepat dan aman;
3. untuk dapat menyelesaikan atau menjawab berbagai persoalan/masalah yang ada terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI, sehingga persoalan atau permasalahan yang terjadi selama ini tidak terjadi lagi.

²⁶ Ibid. hal 36

Tugas/fungsi BNP2TKI adalah:

- a. melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
- b. melaksanakan penempatan atas dasar perjanjian tertulis antara pemerintah dengan pemerintah Negara pengguna TKI, atau antara pemerintah dengan pengguna berbadan hukum;
- c. memberikan pelayanan, mengkoordinasi dan melakukan pengawasan terhadap;
 - dokumen TKI;
 - PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan);
 - Penyelesaian masalah;
 - Pemberangkatan sampai pemulangan;
 - Peningkatan kualitas calon TKI;
 - Sumber-sumber pembiayaan;
 - Kualitas pelaksanaan penempatan TKI;
 - Peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya;

Kewenangan BNP2TKI sesuai perpres No. 81 Tahun 2006:

1. Pasal 48 : pada saat mulai berlakunya peraturan presiden ini, Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Depnakertrans di hapus;

2. Pasal 49 : seluruh hak dan kewajiban Depnakertrans dalam bidang tugas penempatan dan perlindungan TKI, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, beralih kepada BNP2TKI;

Kewenangan atau tanggung jawab BNP2TKI sesuai inpres 06/2006:

- a. Penyuluhan, seleksi dan penandatanganan perjanjian penempatan;
- b. Penerbitan KTKLN;
- c. Pemeriksaan kesehatan calon TKI;
- d. Peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan dan uji kompetensi;
- e. Peningkatan perjanjian kerja sama dengan Negara penerima/pengguna TKI;
- f. Optimalisasi bursa kerja di kabupaten/kota;
- g. Penyediaan tempat kedatangan TKI di bandara Soekarno Hatta;
- h. Fasilitas penyediaan bantuan hukum/pembelaan bagi TKI;
- i. Pemberantasan praktek percaloan/sponsor TKI di daerah;
- j. Pemberantasan praktek percaloan dan praktek premansme di embarkasi/debarkasi;
- k. Evaluasi kinerja PPTKIS;
- l. Penataan lembaga asuransi TKI;
- m. Penataan lembaga sarana kesehatan²⁷

²⁷(<http://www.bnp2tki.go.id/peraturankabnp2tkimainmenu175.html>, diakses pada tanggal 24 November 2013).

Reformasi Penempatan dan Perlindungan yang dibuat oleh BNP2TKI:

1. Kegiatan di luar negeri (kerja sama, promosi dan perlindungan TKI di luar negeri);
2. Memorandum of understanding (MoU);
3. Atase ketenagakerjaan;
4. Citizen service;
5. Lembaga monitoring;
6. Shelter house;
7. Promrsi dan market intelligent (informasi pasar kerja luar negeri);
8. Biaya penempatan;
9. Upah TKI
10. Klaim asuransi TKI di Negara penempatan;
11. Pengelolaan remitansi;
12. Control pembayaran gaji melalui skema perbankan;
13. Pendaftaran dan pemutihan TKI illegal di luar negeri;
14. Keikutsertaan TKI dalam serikat kerja di Negara penempatan;
15. Penerbitan job order/visa wakalah, dengan letter secara on-line;
16. Advokasi dan bantuan hokum TKI di Negara penempatan;
17. Kerjasama forum internasional;

18. Kegiatan di dalam negeri (pemberdayaan, penempatan dan perlindungan CTKI/TKI purna)

- Penyempurnaan system, prosedur pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI;
- Pembentukan dan penguatan kelembagaan BNP2TKI, BP3TKI, SP3TKI DAN P4TKI;
- Pelayanan satu atap;
- Sosialisasi dan pemberdayaan di kantong-kantong TKI;
- Bursa kerja luar negeri;
- Pelayanan penempatan program;
- Kerjasama kelembagaan penempatan TKI formal;
- Kerjasama penempatan dan perlindungan TKI luar negeri;
- Peraturan daerah penempatan dan perlindungan TKI luar negeri;
- Pelayanan di embarkasi dan debarkasi;
- Pelayanan kepulangan di gedung pendataan kepulangan TKI selapajang-Tangerang;
- Pembiayaan penempatan dan perlindungan oleh pemda;
- Community base training centre (pelatihan di kantong TKI)
- Pencegahan penempatan TKI non-prosedural;

- Integrasi system DB TKI (lintas sektor) dan pasar kerja luar negeri;
- Penerbitan SIP (surat ijin pengerahan);
- Kredit TKI;
- Rating/ pemeringkatan BLKLN;
- On-line system pemeriksaan kesehatan;
- Passport TKI (pp 19/tahun 2007, passport TKI 48 halaman bagi TKI formal);
- Pencegahan pemalsuan dokumen CTKI;
- Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);
- Klaim asuransi TKI;
- KTKLN (kartu tenaga kerja luar negeri);
- Crisis centre (advokasi dan bantuan hukum TKI)²⁸

Diharapkan dengan terbentuknya BNP2TKI ini sebagai pelaksana teknis kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang lebih baik, menyeluruh, serta memihak kepada TKI sebagai pahlawan devisa

²⁸ (<http://www.bnp2tki.go.id/infomainmenu281/reformasimainmenu-222/339-reformasi-penempatan-dan-perlindungan.html>, diakses tanggal 24 November 2013).

B. Gambaran Umum TKI Sulawesi Selatan

Remitansi atau kiriman uang dari TKI asal Sulawesi Selatan yang bekerja di sejumlah Negara sudah mencapai Rp. 4,6 miliar. Angka tersebut dipastikan akan terus bertambah, karena ini adalah rekapan per September 2013.²⁹

Menurut kepala BP3TKI Makassar, capaian remitansi 2013 tidak akan jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 5,5 miliar. Dari data BP3TKI Makassar, capaian tertinggi remitansi adalah tahun 2011 yang mencapai Rp. 10,4 miliar. Penurunan remitansi ini disebabkan oleh penurunan jumlah TKI yang dikirim ke luar negeri. Sejak tahun 2010, dilakukan pengetatan tenaga kerja yang akan dikirimkan ke luar negeri diwajibkan mengantongi Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI dan sekaligus sebagai bukti bahwa TKI yang bersangkutan telah memenuhi prosedur untuk bekerja ke luar negeri dan berfungsi sebagai instrument perlindungan, baik pada masa penempatan maupun setelah pulang ke Indonesia.

Sementara itu dari data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatan menyebutkan jika per September 2013 yang terdata sebanyak 4.892 orang. 70% diantaranya dengan tujuan Malaysia, sisanya menyebar di sejumlah Negara seperti Jepang, Am, Erika Serikat, Arab Saudi, Hong Kong, Portugal sampai Nigeria. Para TKI ini berasal dari berbagai kabupaten. Kantong-kantong TKI di Sulawesi Selatan ini seperti Bulukumba, Bantaeng, Gowa, Jeneponto

²⁹ Data BP3TKI Makassar, 21 November 2013

dan Takalar. Jumlah ini menurun drastis, disbanding tahun sebelumnya karena dipicu konflik Tenaga Kerja di Malaysia, berkurangnya pengiriman TKI juga diyakini karena pertumbuhan Ekonomi yang semakin membaik di Sulawesi Selatan. Selain itu juga, pemerintah provinsi juga sudah menyediakan kantong-kantong pekerjaan untuk menyerap pengangguran. Tahun 2013 melalui proyek APBN dan APBD, jumlah realisasi penyerapan tenaga kerja mencapai 41.640 orang, dan belum direkapitulasi dengan penyerapan tenaga kerja di sector swasta.³⁰

1. Koordinasi Regional BNP2TKI di Makassar

Pelaksanaan penempatan dan perlindungan bagi TKI samapai saat ini masih memerlukan perhatian dan penanganan secara serius dan terpadu. Salah satu upaya untuk menangani hal tersebut, BNP2TKI telah menggelar Rapat koordinasi Regional (Rakoreg) Indonesia Timur, yang diikuti semua unit kerja di tingkat pusat dan instansi terkait di tingkat daerah. Hasil Rakoreg itu adalah sbb:

1. BNP2TKI dalam perlindungan dan penempatan TKI merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berfungsi sebagai integrator yang ditugasi mengkoordinasikan dan menjalani fungsi pelayanan, pengawasan dalam proses penempatan dan perlindungan TKI;
2. Legislasi dan kelembagaan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri harus berdasarkan pada UU No. 39 tahun 2004, Perpres

³⁰Data Disnakertrans sulsel dalam <http://ekbis.sindonews.com/read/2013/10/21/34/796585/hingga-september-remittance-tki-sulsel-capai-rp4-6-m> diakses 6 Desember 2013.

No. 81 tahun 2006, Inpres No. 6 tahun 2006, peraturan-peraturan Menakertrans, peraturan kepala BNP2TKI dan perjanjian penempatan dengan Negara penempatan TKI serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI;

3. Konsolidasi dan koordinasi yang dilakukan oleh BNP2TKI dengan instansi teknis terkait dan pelaksana penempatan dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI meliputi aspek penyiapan calon TKI, pelayanan penempatan yang mudah, murah dan cepat baik formal maupun informal dengan terus mengupayakan peningkatan proporsi TKI formal dan advokasi serta perlindungan TKI;
4. Terciptanya sinergi antara permintaan tenaga kerja luar negeri dan penanggulangan pengangguran di setiap daerah diperlukan gerak langkah yang terpadu dalam penyediaan tenaga kerja yang terampil dan memiliki kompetensi sesuai dengan permintaan pasar kerja luar negeri, sesuai kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
5. Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan komitmen pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang terkoordinasi dan sinergis, adalah dalam penyiapan calon TKI (pelatihan dan informasi), penyuluhan dan sosialisasi, pelayanan dokumen,

perlindungan terhadap CTKI/TKI, pendataan penempatan TKI dan pemulangan TKI serta pemberdayaan TKI purna;

6. Peluang kerja di sector formal terbuka untuk calon TKI pada Negara-negara seperti Jepang, Hong Kong, Macau, Singapura, Brunai Darussalam, Australia, New Zeland, Amerika, Kanada, Timur Tengah, Eropa dan Afrika yang meliputi tenaga kerja di bidang kesehatan, perminyakan, konstruksi dan *hospitality* serta pemetik buah yang perlu dimanfaatkan secara optimal oleh daerah-daerah, termasuk wilayah Indonesia Timur.
7. Dalam usaha membina dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI yang meliputi pencegahan, penyelesaian masalah dan penegakan hukum terhadap unsure-unsur yang mengganggu, menghambat atau menghilangkan hak-hak CTKI/TKI di daerah disepakati untuk segera dibentuk SATGAS perlindungan yang merupakan kerjasama lintas sector terkait yang terdiri dari unsur pemda, provinsi/kabupaten/kota, administrator pelabuhan, BP3TKI, imigrasi, dan lain-lain sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota dan dipimpin oleh salah satu instansi yang ditunjuk;
8. Untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan bagi WNI CTKI dalam rangka penempatan TKI ke luar negeri telah diatur berdasarkan UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi

kependudukan dan peraturan pemerintah No. 37 tahun 2008 tentang pelaksanaan UU No. 23 tahun 2006 dan Perpres No. 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

9. Dengan ditetapkannya UU No. 23 tahun 2006 dan Perpres No. 25 tahun 2008 setiap WNI yang akan pindah ke luar negeri setelah memenuhi syarat berupa surat keterangan pindah, KK, KTP akan mendapatkan surat keterangan pindah ke luar negeri yang dipergunakan untuk pengurusan paspor. Untuk itu pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) di wilayah kerja BP3TKI Makassar harus melaksanakan kebijakan tersebut berkoordinasi dengan dinas yang menangani kependudukan;

10. Kegiatan pendataan dan informasi di wilayah Indonesia Timur dalam rangka pelayanan dan penempatan TKI serta pendataan TKI bermasalah dan kepulangan TKI harus ditingkatkan dengan koordinasi dan sinergi antara stakeholder dengan instansi teknis terkait yang menangani penempatan TKI di tingkat kabupaten/kota antara lain dinas yang menangani ketenagakerjaan, administrasi kependudukan, imigrasi, kepolisian, konsorsium asuransi, BP3TKI dan pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS);

11. Pare Pare sebagai kota pelabuhan pemberangkatan di wilayah Indonesia Timur perlu difungsikan pos pelayanan terpadu dalam rangka pelayanan penempatan dan kepulangan TKI dengan melibatkan instansi teknis terkait, para stakeholder yaitu PPTKIS, dan konsorsium asuransi terutama dalam kegiatan pendataan, pelayanan dokumen CTKI, pemberangkatan dan kepulangan TKI melalui koordinasi yang sinergis di bawah koordinasi pemerintah daerah;
12. Dalam rangka peningkatan pelayanan penempatan TKI di wilayah Indonesia Timur, maka perlu sinkronisasi antara BP3TKI Makassar, BP3TKI Nunukan dan koordinasi dengan instansi teknis terkait di wilayah masing-masing dalam pelayanan penempatan dan dokumen jati diri CTKI serta pendataan kepulangan TKI;
13. Kegiatan sosialisasi kepada CTKI perlu ditingkatkan di wilayah Indonesia Timur terutama tentang syarat dan prosedur CTKI dalam penerapan UU No. 23 tahun 2006 dengan koordinasi instansi teknis terkait.
14. Dalam meningkatkan upaya link dan match dunia pendidikan dengan penempatan TKI ke luar negeri diharapkan program pendidikan menghasilkan tamatan kompetitif dipasar kerja internasional, mengembangkan pembelajaran berbasis produksi

- dan sertifikasi kompetensi yang dapat dikoordinasikan dengan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) yang dimiliki pelaksana penempatan TKI ke luar negeri ataupun BLK-BLK milik Pemerintah dan Pemerintah Provinsi/Kab./Kota;
15. Bagi TKI purna diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan pada saat kepulangan;
 16. Dalam rangka memberikan peran kepada Lembaga Sosial Masyarakat dalam perlindungan kepada TKI diharapkan peran LSM untuk memberikan advokasi pada TKI yang bermasalah baik dalam masa penempatan maupun pada saat kepulangan;
 17. Kepolisian harus melakukan Penindakan Hukum terhadap pelintas batas, PPTKIS yang melanggar peraturan perundangan, TKI ilegal dan pelaku trafficking serta melakukan pengamanan terhadap kepulangan TKI;
 18. Peran Perbankan dalam pembiayaan TKI yaitu pemberian Kredit untuk TKI melalui PPTKIS yang memiliki kerjasama dengan Perbankan, dimana PPTKIS sebagai avalis dalam rangka pembiayaan penempatan dan layanan perbankan lain berupa

tabungan TKI, pengiriman uang dan pemberian kredit bagi TKI

Purna.³¹

2. *Contoh Kasus Yang Dialami TKI Sulawesi Selatan*

1. Masalah Narkoba

Sebanyak 22 orang dari 129 warga negara Indonesia (WNI) bermasalah yang dideportasi pemerintah Kerajaan Malaysia melalui Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara karena tersangkut kasus narkoba. Muh Afsar, staf Konsulat RI Tawau, Negeri Bagian Sabah Malaysia di Nunukan, Senin mengatakan, terdapat 22 orang WNI bermasalah yang dipulangkan tersebut karena kasus narkotika.

Usai menyerahkan TKI bermasalah itu kepada petugas Imigrasi Nunukan Pos Pemeriksaan Pelabuhan Internasional Tunon Taka, ia mengatakan, WNI bermasalah yang tersangkut kasus narkoba itu merupakan hasil penangkapan aparat kepolisian di negeri jiran Malaysia pada Mei dan Juni 2013 dan telah menjalani hukumannya sesuai putusan Mahkamah Tawau.

"WNI bermasalah yang dipulangkan ini sebanyak 22 orang dihukum karena kasus narkoba. Merela ditangkap pada Mei dan Juni 2013," ujarnya Afsar mengatakan ,selain "overstay" dan kasus narkoba, lima orang dipulangkan karena tersangkut kasus kriminal perampokan. Yusuf

³¹<http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/720-rakoreg-bnp2tki-di-makasar-ada-ribuan-lowongan-sektor-formal.html> diakses tanggal 6 Desember 2013

Hamzah, salah seorang WNI bermasalah yang dipulangkan pemerintah Kerajaan Malaysia karena tersangkut kasus narkoba mengaku, dirinya telah menjalani hukuman sekitar enam bulan sejak tertangkap Mei 2013 lalu di camp tempatnya bekerja di Ladang Perkebunan Kelapa Sawit Jatika Wilayah Kunak Tawau.

"Saya dipulangkan karena kasus narkoba.Saya ditangkap di camp tempat kerja di Ladang Perkebunan Kepala Sawit Jatika (Kunak) saat sedang memakai batu atau shabu," katanya.³²

Asfar yang kedua orang tuanya berasal Sulawesi Selatan dan bertempat tinggal di Pasar Baru, Kabupaten Nunukan itu mengaku tertangkap pertama kali ketika mengonsumsi shabu.³³

2. Penyakit HIV

Seorang TKW di Pinrang dipastikan positif mengidap HIV.Temuan ini menimbulkan kecemasan bahwa pola penyebaran AIDS di Pinrang tidak lagi hanya melalui jarum suntik, tetapi hubungan seks bebas.Pelaksana program penanggulangan HIV Aids Pinrang, Andi Bakhtiar Tombong mensinyalir adanya peran TKI yang bekerja di Malaysia atau Singapura terkait penularan HIV Aids di Pinrang.

³²<http://www.beritasatu.com/nasional/153278-tersangkut-narkoba-22-wni-dideportasi-dari-malaysia.html> 8 desember 2013.diakses tanggal 8 Desember 2013

³³Ibid hal. 50

TKW tersebut, kata Bakhtiar, merupakan satu dari total tiga warga Pinrang yang positif terjangkit HIV tahun ini. Mereka terdeteksi secara tidak bersamaan saat memeriksakan penyakitnya di salah satu rumah sakit di Pinrang. Saat kandungan darahnya diperiksa, petugas laboratorium menemukan adanya HIV dalam darah. Meski menemukan tiga penderita HIV tahun ini, namun jumlah tersebut tergolong turun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2012, jumlah penderita HIV sebanyak 17 orang. Selain itu, 19 orang diketahui sudah terjangkit AIDS, fase lanjutan dari HIV. Saat ini, sebagian besar penderita telah menjalani terapi dan proses pendampingan yang dilakukan oleh tim.³⁴

C. Gambaran Umum Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

Setelah dikejutkan dengan pembengkakan angka kemiskinan periode Maret 2011- September 2011, Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan bias bernafas lega di tahun 2012. Pasalnya, jumlah dan persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan kembali mengalami penurunan. Menurut hasil kalkulasi

³⁴http://www.fajar.co.id/sulawesiselatan/3045068_5663.html diakses tanggal 8 desember.

BPS³⁵, jumlah penduduk miskin menurun dari 835.510 orang pada September 2013, menjadi 825.790 pada maret 2012 atau menurun sebesar 1,16 %.

Menurut Agussalim, penurunan angka kemiskinan tersebut terutama jika dilihat dari perspektif wilayah, penurunan angka kemiskinan ternyata hanya berlangsung di wilayah perkotaan, tetapi tidak di wilayah pedesaan. Hal ini atas dasar data BPS periode 2011-2012 yang merilis bahwa di wilayah pedesaan, penduduk miskin bertambah 0,7 ribu orang, sedangkan untuk wilayah perkotaan menurun sebesar 7,8 ribu orang. Ada tiga alasan menurut Agussalim mengapa fenomena seperti ini muncul: **Pertama**, Adagium yang terkenal luas di kalangan para Ekonom bahwa “pasang naik air laut akan mengangkat sebuah perahu” tampaknya tidak berlaku di Sulaesi Selatan. Pertumbuhan Ekonomi yang cukup impresif pada tahun 2011 ternyata tidak mampu mengangkat taraf hidup semua kelompok penduduk. Taraf hidup kelompok miskin di wilayah pedesaan justru semakin memburuk yang diindikasikan oleh bertambahnya jumlah penduduk miskin; **Kedua**, Jika pertumbuhan ekonomi tidak member dampak terhadap penduduk miskin di wilayah pedesaan, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh penduduk menengah-atas yang bermukim di wilayah perkotaan. Jika pertumbuhan ekonomi lebih bias ke kelompok penduduk kelas menengah-atas ketimbang kelompok penduduk kelas bawah, maka dapat dipastikan bahwa distribusi pendapatan akan cenderung semakin melebar dan timpang; **Ketiga**, Secara implicit,

³⁵ Agussalim, *Memaknai angka kemiskinan Sulawesi Selatan*, 10 September 2012

pembengkakan jumlah penduduk miskin juga menegaskan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang diimplementasikan secara massif dalam beberapa tahun terakhir tampaknya tidak cukup efektif untuk memperbaiki taraf hidup penduduk miskin, khususnya di wilayah pedesaan. Dalam konteks ini, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan berbagai upaya program pengentasan kemiskinan dapat dinilai tidak berhasil di Sulawesi Selatan. Dalam perspektif perencanaan, PNPM boleh jadi berhasil pada tataran *output* (memperbaiki saluran irigasi, jalan desa, pemukiman dsb.), tetapi tentu saja tidak berhasil pada tataran *impact* (mengurangi jumlah penduduk miskin).



BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Kontribusi TKI Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan.

Dalam kerangka konseptual pada BAB I telah dijelaskan bahwa kontribusi TKI adalah keikutsertaan atau sumbangan yang diberikan oleh TKI dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Perlu diketahui bahwa TKI menghasilkan devisa dalam bentuk remitansi. Dalam skripsi ini, penulis membahas remitansi TKI mulai tahun 2011-2013. Penulis akan menganalisis pertumbuhannya dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan yang akan di analisis adalah: *pertama* pertumbuhan remitansi TKI itu sendiri. Bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun (2011-2013), Apakah mengalami pertumbuhan atau malah sebaliknya, apabila mengalami pertumbuhan berapa jumlahnya begitupun kalau mengalami penurunan; *Kedua*, remitansi TKI tersebut dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, remitansi TKI memberikan atau berkontribusi berapa persen? Berikut ditampilkan tabel remitansi TKI Sulawesi Selatan sejak tahun 2011-2013. berdasarkan data yang diberikan oleh BP3TKI Makassar tanggal 21 November 2013:

1. Remitansi TKI tahun 2011.

**LAPORAN PENERIMAAN REMITANSI TKI
BP3TKI MAKASSAR, TAHUN 2011**

NO	BULAN	JUMLAH TKI	REMITANSI	
			US \$	Rp
1	2	3	4	5
1	JANUARI	706	\$ 51,872	Rp 480,278,140
2	FEBRUARI	1273	\$ 141,223	Rp 1,246,294,700
3	MARET	1100	\$ 129,778	Rp 1,128,676,501
4	APRIL	615	\$ 76,857	Rp 660,281,085
5	MEI	522	\$ 74,494	Rp 637,748,327
6	JUNI	934	\$ 113,759	Rp 974,576,593
7	JULI	849	\$ 97,275	Rp 833,354,154
8	AGUSTUS	475	\$ 63,346	Rp 542,686,618
9	SEPTEMBER	687	\$ 75,897	Rp 687,403,274
10	OKTOBER	1052	\$ 105,119	Rp 955,639,531
11	NOVEMBER	1535	\$ 165,859	Rp 1,506,008,274
12	DESEMBER	916	\$ 89,116	Rp 819,953,791
JUMLAH TOTAL		10664	\$ 1,184,595	Rp 10,472,900,988

Data remitansi dihitung berdasarkan jumlah penempatan TKI di BP3TKI Makassar per bulan selama tahun 2011.³⁶

³⁶BP3TKI Makassar, 21 November 2013

2. Remitansi TKI SULSEL tahun 2012

**LAPORAN PENERIMAAN REMITANSI TKI
BP3TKI MAKASSAR TAHUN 2012**

NO	BULAN	JUMLAH TKI	REMITANSI	
			US \$	Rp
1	2	3	4	5
1	JANUARI	337	\$ 34,912	Rp 313,333,237
2	FEBRUARI	495	\$ 55,690	Rp 499,822,068
3	MARET	472	\$ 48,558	Rp 435,810,607
4	APRIL	617	\$ 66,702	Rp 598,650,054
5	MEI	557	\$ 56,078	Rp 21,734,432
6	JUNI	457	\$ 45,149	Rp 425,985,946
7	JULI	537	\$ 53,616	Rp 505,864,589
8	AGUSTUS	265	\$ 30,641	Rp 291,928,181
9	SEPTEMBER	377	\$ 39,197	Rp 369,829,603
10	OKTOBER	598	\$ 59,981	Rp 565,922,321
11	NOVEMBER	1091	\$ 106,589	Rp 1,005,663,134
12	DESEMBER	521	\$ 58,506	Rp 552,004,346
JUMLAH		6324	\$ 655,619	Rp 5,586,548,518

Data remitansi dihitung berdasarkan jumlah penempatan TKI per bulan selama tahun 2012³⁷

³⁷Ibid hal. 57

3. Remitansi TKI tahun 2013

**LAPORAN PENERIMAAN REMITANSI TKI
BP3TKI MAKASSAR TAHUN 2013**

NO	BULAN	JUMLAH TKI	REMITANSI	
			US \$	Rp
1	2	3	4	5
1	JANUARI	566	\$ 66,845	Rp 651,407,236
2	FEBRUARI	443	\$ 41,557	Rp 391,680,754
3	MARET	728	\$ 70,205	Rp 661,678,536
4	APRIL	283	\$ 24,565	Rp 240,125,491
5	MEI	491	\$ 45,943	Rp 453,692,266
6	JUNI	453	\$ 49,428	Rp 492,649,168
7	JULI	800	\$ 75,908	Rp 826,640,765
8	AGUSTUS	642	\$ 58,778	Rp 639,221,215
9	SEPTEMBER	416	\$ 37,204	Rp 428,781,506
10	OKTOBER	0	\$ -	Rp -
11	NOVEMBER	0	\$ -	Rp -
12	DESEMBER	0	\$ -	Rp -
JUMLAH		4822	\$ 470,433	Rp 4,785,876,937

Data remitansi dihitung berdasarkan jumlah penempatan TKI per bulan selama tahun 2012³⁸

³⁸BP3TKI Makassar *loc.cit*

1. Pertumbuhan remitansi TKI Sulawesi Selatan

Berdasarkan laporan dari BP3TKI Makassar di atas maka dapat dikatakan bahwa TKI memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2011, jumlah TKI Sulawesi Selatan yang bekerja di luar negeri mencapai 10.664 orang dengan total remitansi yang dihasilkan sebesar Rp.10.472.900.988. Pada tahun 2012 justru menurun baik dari segi jumlah TKI maupun dari segi remitansi yang dihasilkan. Jumlah TKI tahun 2012 hanya 6324 orang yang berarti berkurang 4340 dari tahun sebelumnya atau menurun 40,69 %. Begitupun dari segi remitansi yang dihasilkan jumlahnya berkurang menjadi RP 5.586.548.518 yang berarti berkurang Rp.4.886.362.470 atau berkurang 46,65% dari tahun sebelumnya.

Dapat dilihat bahwa penurunan remitansi tidak sama dengan penurunan jumlah tenaga kerja. Apabila kita mengingat kembali teori yang dikemukakan oleh Boediono pada BAB I yang mengatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang." Jadi, persentase pertambahan *output* itu haruslah lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut". Maka dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2011 ke tahun 2012, remitansi TKI menurun dan tidak berhasil. Meskipun jumlah TKI menurun, namun tidak seimbang dengan besarnya remitansi yang dihasilkan. Pada tahun 2012. Dalam konteks

TKI sulsel, penambahan penduduk diasumsikan dengan jumlah tenaga kerja, dan penambahan *outputnya* adalah remitansi TKI.

Selanjutnya kita melihat laporan BP3TKI Makassar pada tahun 2013, dimana jumlah TKI per September 2013 mencapai 4822 yang berarti berkurang untuk sementara sebanyak 1502 orang dari tahun 2012 atau menurun 23,75%. Sedangkan remitansinya berkurang menjadi Rp.4.785.876.937 atau turun Rp.800.671.581 (14,33%). Apabila kita menggunakan teori Boediono tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dari tahun 2012 ke tahun 2013, TKI dianggap berhasil, karena penurunan jumlah TKI lebih besar daripada penurunan remitansi yang mereka hasilkan. Ini adalah pertanda yang bagus, meskipun laporan tahun 2013 baru sampai bulan September, namun TKI sudah mulai memperlihatkan produktivitas mereka di luar negeri.

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa TKI memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

2. Kontribusi remitansi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan.

Besarnya PAD Sulsel pada tahun 2011 adalah sebesar 1,96 triliun rupiah. Pada tahun 2011, TKI asal sulsel menyumbang remitansi sebesar 10,47 miliar rupiah. Terhadap PAD ini, remitansi TKI berkontribusi sebesar 0,53 %.

Berdasarkan hasil sidang pleno DPRD Sulawesi Selatan tahun 2012³⁹ menetapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Selatan sebesar Rp. 2,34 triliun atau naik 376 miliar dari tahun 2011 atau tumbuh 19 %. Sementara remitansi TKI Sulawesi Selatan pada tahun 2012 sebesar 5,5 miliar. Apabila dihitung berdasarkan besarnya pertumbuhan ekonomi Sulsel dari tahun 2011 ke tahun 2012, maka kontribusi remitansi TKI adalah sebesar 1,46 %. Sedangkan apabila dihitung berdasarkan jumlah PAD Sulsel secara keseluruhan, kontribusi remitansi TKI hanya sebesar 0,23 %.

Berlanjut ke tahun 2013 yang sampai saat ini masih bersifat prediksi, dimana Dinas Pendapatan Daerah provinsi Sulawesi Selatan⁴⁰ menargetkan besarnya PAD Sulsel tahun 2013 sebesar 2,4 triliun rupiah atau naik 230 miliar dari tahun sebelumnya. Apabila target ini tercapai nantinya, dan begitupun dengan target BP3TKI Makassar yang mengatakan bahwa target remitansi TKI Sulsel tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu yaitu sebesar 5,5 miliar, maka kontribusi remitansi TKI terhadap PAD tahun 2013 adalah sebesar 0,22 %, sedangkan kontribusi remitansi terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatan dapat diprediksi akan mencapai 2,39 %.

³⁹<http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/35143/pad-sulsel-ditetapkan-rp234-triliun> diakses 6 Desember 2013

⁴⁰Dispenda sulsel dalam <http://sulselprov.go.id/berita-target-pad-sulsel-naik-rp-230-miliar-atau-sekitar-1094-persen.html> diakses tanggal 6 Desember 2013

B. Pengelolaan Devisa TKI Asal Sulawesi Selatan Terhadap Penanggulangan kemiskinan.

a. Program pemerintah untuk TKI

Hal ini sangat penting untuk diketahui karena kebanyakan para TKI yang bekerja di luar negeri memiliki tujuan agar keluar dari kemelut ekonomi. Apabila Remitansi yang mereka hasilkan tidak diberdayakan, maka apa yang mereka kerjakan selama di luar negeri akan berakhir sia-sia. Oleh karena itu ada hal yang harus diketahui baik oleh TKI maupun pemerintah agar Remitansi tersebut tidak salah arah dan para TKI dapat keluar dari kemiskinan dalam waktu yang relative cepat dan bertahan untuk jangka waktu yang lama.

Program pemerintah untuk memberdayakan devisa TKI⁴¹ adalah:

1. bimbingan wirausaha,
2. pengembangan usaha,
3. pendampingan,
4. membangun akses untuk memperoleh kredit modal perbankan
5. Mendorong terbentuknya asosiasi TKI purna yang dimaksudkan sebagai wadah integrasi dan konsultasi TKI purna dalam meningkatkan dalam mengembangkan potensi dan usaha yang mereka miliki.

⁴¹http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1700&Itemid=195, diakses pada tanggal 20 November 2013

b. Program-program pemerintah untuk TKI yang terealisasi:

1. Penguatan kelembagaan PKBM oleh Kemdiknas

Terlepas dari beberapa program yang telah disampaikan sebelumnya, Kementerian Pendidikan Nasional⁴² juga mengembangkan program Pemberdayaan bagi TKI di sejumlah provinsi yang menjadi sentra pengiriman TKI melalui penguatan kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).

Tidak semua TKI yang kembali ke tanah air pulang dengan membawa sejumlah hasil kerja sesuai harapan, sebagian malah pulang dengan tangan hampa, menderita siksaan fisik dan psikologis, dan bahkan beberapa diantaranya berurusan dengan hukum di Negara tujuan. Salah satu bentuk program rintisan yang dilaksanakan mulai tahun 2011 ini adalah program penguatan kelembagaan PKBM di daerah sentra TKI yang banyak didirikan secara mandiri oleh masyarakat untuk memberikan pembelajaran keaksaraan yakni membaca, menulis dan berhitung.⁴³

PKBM menjadi kepanjangan tangan Kemdiknas untuk memberikan pendidikan keaksaraan bagi masyarakat di sekitarnya, pendidikan kesetaraan

⁴²<http://www.investor.co.id/home/kemdiknas-kembangkan-program-pemberdayaan-tki/21283> diakses 6 Desember 2013

⁴³Ella Yulaelawati, *Remitansi dan Kompetensi TKI* dalam <http://www.investor.co.id/home/kemdiknas-kembangkan-program-pemberdayaan-tki/21283> diakses tanggal 8 Desember 2013

paket A, B, dan C serta pendidikan kecakapan hidup (*life skill*). Program ini dirintis sejak tahun 2011 untuk membantu memberdayakan calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri dan kembali dari luar negeri, terutama yang berada dalam kondisi kurang beruntung agar memiliki keterampilan kewirausahaan. Program ini diutamakan bagi PKBM-PKBM yang berada di sentra pengiriman TKI, antara lain Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi.

Program ini tidak saja diharapkan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri dan TKI yang sudah kembali ke tanah air, tetapi juga mendorong terwujudnya masyarakat yang gemar belajar dengan mengedepankan filosofis belajar sepanjang hayat.

Alokasi pemberian bantuan dana penyelenggaraan program ini, pada tahun 2011 diberikan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdiknas sebesar Rp. 3 miliar dengan sasaran sebanyak 15 lembaga PKBM yang terpilih berdasarkan kompetisi proposal. Adapun setiap PKBM sebagai lembaga penyelenggara program rintisan PKBM sentra TKI yang terpilih diberikan bantuan dana yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan program kegiatan, yaitu masing-masing sebesar Rp. 200 juta.

Sementara untuk konteks Sulawesi selatan, penulis tidak menemui adanya realisasi program tersebut. "Program PKBM sulit dijangkau oleh masyarakat Sulsel karena persaingannya sangat ketat."⁴⁴

2. Pemberdayaan TKI purna

Pemberdayaan TKI purna saat ini masih bersifat terpusat. Keberadaan BP3TKI sebagai perpanjangan tangan BNP2TKI hanya untuk membantu proses legalisasi calon TKI dan memastikn bahwa TKI kembali ke daerahnya dalam keadaan aman. Adapun persoalan pemberdayaan TKI purna masih bersifat terpusat.

Menurut Lisna Yoeliani⁴⁵BNP2TKI telah memberdayakan 8612 orang TKI purna sejak tahun 2010.Terdapat lima bentuk pemberdayaan TKI purna yang dilakukan BNP2TKI yaitu edukasi keuangan, edukasi kewirausahaan, temu wicara dan ekspo TKI purna, pembinaan dalam rangka penguatan asosiasi TKI purna, dan bimbingan rehabilitasi TKI purna bemasalah. Tujuan dari edukasi keuangan adalah memberikan bekal dan pendampingan bagi TKI dan keluarganya agar mampu mengelola kiriman uang (remitansi) dengan baik, sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan kegiatan produktif bagi dirinya sendiri dan keluarganya.

⁴⁴Wawancara kepala BP3TKI Makassar tanggal 22 November.

⁴⁵ Lisna Yoeliani, *Diskusi Publik dan Pengamugeraan Penghargaan Indonesia Migrant Worker Award 2012*" dalam <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/7842-bnp2tki-telah-memberdayakan-8612-tki-purna.html> diakses 6 Desember 2013

Tujuan edukasi kewirausahaan memberikan bekal dan pendampingan bagi TKI dan keluarganya agar mampu membangun usaha sebagai upaya peningkatan ekonomi keluarga sehingga dapat berdampak pada pembangunan ekonomi disekitar wilayah tempat tinggalnya dan lingkungannya.

Temu wicara dan ekspo TKI purna, memfasilitasi calon TKI/TKI purna dan keluarganya dalam bentuk temu wicara dengan stakeholder/pemerintah dan memfasilitasi TKI purna berusaha untuk mempromosikan hasil usaha yang dilakoninya.

Pembinaan dalam rangka penguatan Asosiasi TKI purna memfasilitasi calon TKI/TKI purna dan keluarganya dalam bentuk temu wicara dengan stakeholder/pemerintah dan memfasilitasi TKI purna berusaha untuk mempromosikan hasil usaha yang dilakoninya, serta dimotivasi agar membentuk Asosiasi TKI purna.

Sedangkan bimbingan rehabilitasi TKI purna bermasalah, memfasilitasi calon TKI/TKI purna dan keluarganya dalam bentuk temu wicara dengan stakeholder/pemerintah termasuk memfasilitasi TKI purna untuk mempromosikan hasil usahanya.

Edukasi keuangan tahun 2010 diikuti oleh 300 orang, tahun 2011 sebanyak 1810 orang dan tahun 2012 sebanyak 1800 orang. Kewirausahaan tahun 2010 diikuti 455 orang, tahun 2011 sebanyak 1277 orang dan tahun 2012 sebanyak 1700 orang. Ekspo TKI purna tahun 2010 diikuti 400 orang,

tahun 2011 di Lampung Timur sebanyak 300 orang dan tahun 2012 di Serang Banten diikuti 320 orang.

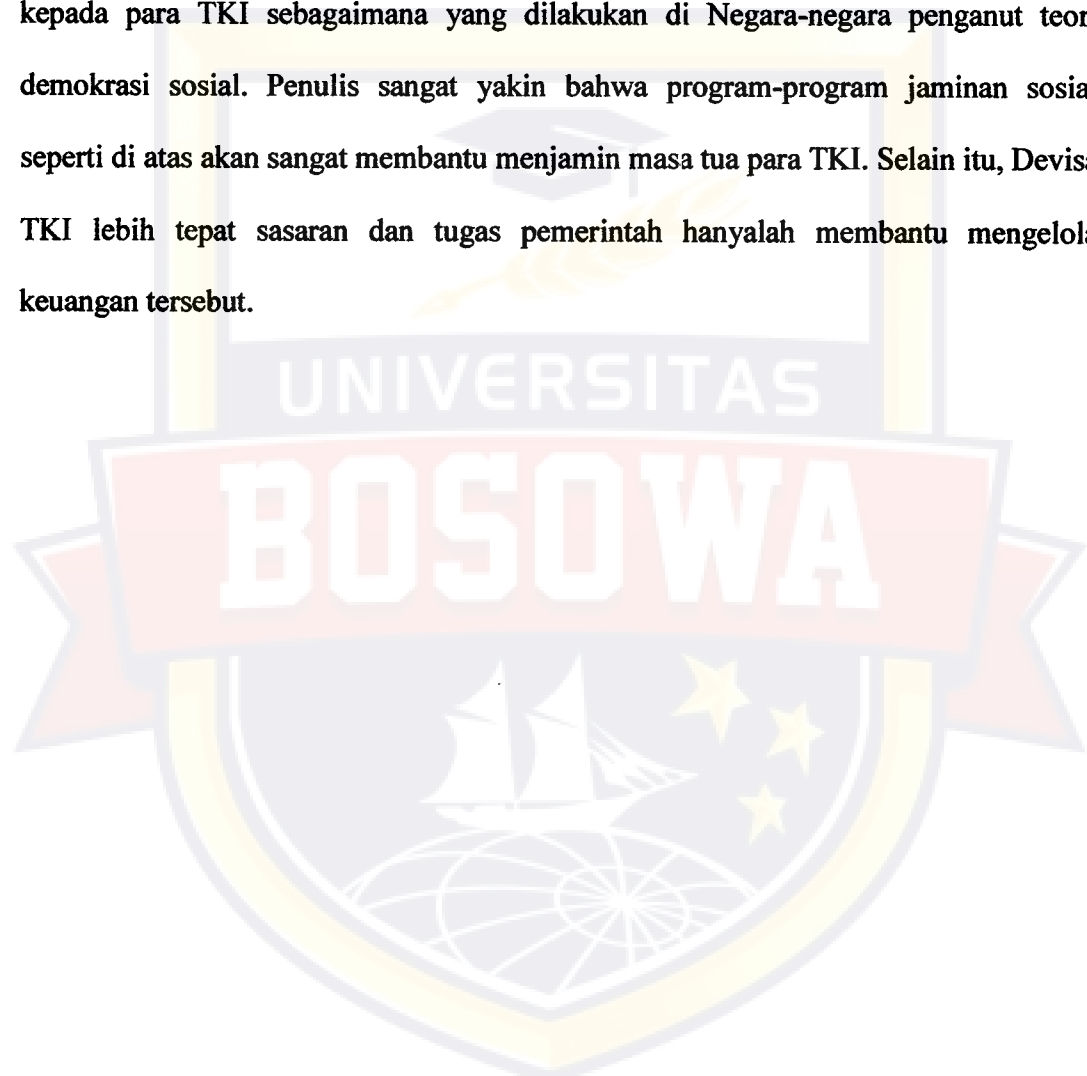
Sedangkan pembinaan dalam rangka penguatan Asosiasi TKI purna tahun 2010 di Palembang, Sumatera Selatan diikuti 50 orang, tahun 2011 di Pare-pare, Sulawesi Selatan diikuti 50 orang dan tahun 2012 di Kupang NTT diikuti 50 orang.

BNP2TKI juga berharap agar ada kesadaran dan pengetahuan TKI purna dalam mempersiapkan catatan keuangan, penganggaran dan perencanaan keuangan, memperbaiki perilaku menabung dan hasil tabungan TKI dan tidak bergantung kepada pinjaman, bertambahnya keterampilan diri TKI untuk membuka usaha dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga, serta melahirkan bibit-bibit TKI yang mandiri dan berdaya sebagai upaya peningkatan ekonomi nasional.

c. Analisis

Dari beberapa program yang dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan TKI masih bersifat terpusat. Pemerintah provinsi hanya memiliki sedikit ruang untuk mengelola devisa TKI. Sementara menurut pandangan teori Demokrasi Sosial bahwa strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat institusional. Artinya pemerintah daerah/ provinsi sebagai institusi terdekat dengan masyarakat miskin haruslah diberi ruang yang besar untuk mengatasi kemiskinan di daerahnya.

Hal lain yang tidak dilakukan oleh pemerintah adalah program-program jaminan sosial bagi TKI seperti pemberian tunjangan pendapatan atau dana pensiun kepada para TKI sebagaimana yang dilakukan di Negara-negara penganut teori demokrasi sosial. Penulis sangat yakin bahwa program-program jaminan sosial seperti di atas akan sangat membantu menjamin masa tua para TKI. Selain itu, Devisa TKI lebih tepat sasaran dan tugas pemerintah hanyalah membantu mengelola keuangan tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang penuliskan paparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. TKI asal Sulawesi Selatan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dalam bentuk remitansi yang mereka hasilkan. TKI telah membantu Negara dalam mengurangi pengangguran di Indonesia. Untuk Sulawesi Selatan, Remitansi TKI yang tertinggi terjadi pada tahun 2011 yang menembus angka Rp. 10 miliar, sedangkan pada tahun 2012 turun menjadi Rp. 5,5 miliar. Pada tahun 2013 ini berdasarkan laporan BP3TKI Makassar per september 2013 baru Rp 4 miliar. Dari segi jumlah TKI, TKI Sulsel terus menurun tiap tahunnya sejak tahun 2011 sampai sekarang.
2. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam memanfaatkan remitansi TKI, terutama bagi TKI purna adalah:
 - bimbingan wirausaha,
 - pengembangan usaha,
 - pendampingan,
 - membangun akses untuk memperoleh kredit modal perbankan

- Mendorong terbentuknya asosiasi TKI purna yang dimaksudkan sebagai wadah integrasi dan konsultasi TKI purna dalam meningkatkan dalam mengembangkan potensi dan usaha yang mereka miliki.

B. Saran

Agar dapat meningkatkan remitansi TKI, pemerintah disarankan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di kalangan calon TKI, sehingga mereka memiliki keahlian sebelum berangkat ke Negara tujuan. Pemerintah harus memperbanyak TKI yang memiliki profesionalisme, bukan malah membiarkan rakyatnya menjadi pekerja rumah tangga atau tukang kebun di Negara lain. Kalau perlu pemerintah, sudah saatnya berfikir untuk menghentikan pengiriman TKI non-formal seperti pembantu rumah tangga, tentunya dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai di dalam negeri.

Untuk strategi pemberdayaan remitansi TKI, pemerintah disarankan agar mendorong para TKI purna untuk berwirausaha dengan jenis usaha yang saling bersinergi antara satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan persaingan yang sehat antar jenis usaha.

Pemerintah juga dituntut untuk menjalankan amanah Undang-undang dengan penuh tanggung jawab, sehingga ke depan tidak ada lagi TKI yang terjerumus ke dalam kasus-kasus. Selain itu, pemerintah disarankan untuk mengelola devisa TKI dengan tujuan menjamin masa tua para TKI. Konsep pemberian dana pensiun bagi

mantan TKI dapat dilakukan oleh pemerintah agar para TKI tetap menikmati hasil kerjanya dalam jangka waktu yang lama.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Andrew, Linklater dan Scott Burchill, *Teori-Teori Hubungan Internasional*, Bandung: PT. Nusa Media, 1996.

Budiman, Arief, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Friedman, Thomas L, *Memahami Globalisasi; Lexus dan Pohon Zaitun*, Bandung: Penerbit ITB, 2002.

Hady, Hamdi, 1992, *Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

Jones, Walter S, *Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional, dan Tatanan Dunia 2*, terjemahan Budiono K, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Jackson, Robert dan Sorensen Georg, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Mas'oed, Mochtar, *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Nopirin, *Ekonomi Internasional*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1995.

Tadoro, Michael P, *Pembangunan Ekonomi 2*, Edisi kelima, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Tarigan, Robinson, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004

INTERNET

<http://www.bnp2tki.go.id/infomainmenu281/reformasimainmenu-222/339-reformasi-penempatan-dan-perlindungan.html>, diakses tanggal 25 November

http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/published_docs/Final-LM-Report-BahasaIndonesia.pdf, diakses pada tanggal 20 november 2013

<http://kalyanamitra.or.id/index.php>, diakses pada tanggal 20 November 2013.

<http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources> diakses tanggal 20 november 2013

<http://www.sulsel.go.id/content/dispenda-targetkan-pad-sulsel-2013-naik->, diakses 6 Desember 2013

<http://ekbis.sindonews.com/read/2013/10/21/34/796585/hingga-september-remittance-tki-sulsel-capai-rp4-6-m>, diakses 6 Desember 2013

<http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/720-rakoreg-bnp2tki-di-makasar-ada-ribuan-lowongan-sektor-formal.html>, diakses 6 Desember 2013

<http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/7842-bnp2tki-telah-memberdayakan-8612-tki-purna.html> diakses 6 desember 2013

<http://www.stie-atmabhakti.ac.id/berita-174-remitansi-dan-kompetensi-tki.html>

diakses 6 Desember 2013

<http://www.investor.co.id/home/kemdiknas-kembangkan-program-pemberdayaan-tki/21283>

diakses 6 Desember 2013

<http://sulselprov.go.id/berita-target-pad-sulsel-naik-rp-230-miliar-atau-sekitar-1094-persen.html> diakses 6 Desember 2013

<http://www.beritasatu.com/nasional/153278-tersangkut-narkoba-22-wnidideportasi-dari-malaysia.html>

Diakses 8 desember 2013

http://www.fajar.co.id/sulawesiselatan/3045068_5663.html

diakses 8 Desember 2013

